

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kabupaten Semarang

Halaman 23

Banggar DPRD Sampaikan Delapan Rekomendasi

UNGARAN- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang menyampaikan delapan rekomendasi kepada Bupati Semarang, Mundjirin.

Rekomendasi itu dibacakan oleh Plt Sekretaris DPRD, Yosef Gunawan Wibisono dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang dengan agenda Persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, Selasa (25/6).

Yosef mengungkapkan, delapan poin rekomendasi itu, di antaranya Banggar DPRD Kabupaten Semarang menyepakati adanya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2018 sebesar Rp 181.106.149.672.

Kemudian terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Tengah yang setiap tahunnya selalu menemukan kekurangan volume pekerjaan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Temuan kekurangan volume pekerjaan ada di tujuh OPD, meliputi RSUD Ungaran, RSUD Ambarawa, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pekerjaan Umum.

"Untuk itu, OPD diinstruksikan untuk mengevaluasi kinerja konsultan pelaksana dan konsultan pengawas," kata Yosef.

Selanjutnya terkait realisasi retribusi dan pendapatan BUMD yang tidak sesuai target. Dengan demikian, perlu adanya evaluasi pengelolaan pendapatan.

Rekomendasi lainnya, terkait pendapatan asli daerah (PAD) agar dinaikkan dengan melihat potensi pendapatan yang ada dan mencari potensi pendapatan yang baru.

"Banggar juga merekomendasikan, kaitannya aset pemerintah daerah agar dikelola oleh OPD terkait. Dengan demikian, tidak diperlukan adanya pihak ketiga. Misalnya dikelola LKMK," lanjutnya.

Adapun rekomendasi ketujuh, Banggar meminta Bupati Semarang segera mengevaluasi penempatan pejabat di OPD agar sesuai dengan kompetensinya. Dan, rekomendasi kedelapan, Bupati Semarang diminta menindak lanjuti dan menyelesaikan temuan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah dalam LKPD 2018 Kabupaten Semarang.

Bupati Semarang Mundjirin menyatakan pihaknya masih berpikir memaksimalkan PAD, terutama dari sektor pariwisata mengingat potensinya cukup besar.

Hal itu menyusul di Kabupaten Semarang ada banyak objek wisata, termasuk hotel dan kuliner.

"Apakah betul pengunjung restoran dan hotel laporannya sudah sesuai? Saya khawatir jangan-jangan yang makan di restoran atau menyewa hotel 10 orang tetapi dilaporkan 5 orang saja. Jangan-jangan seperti itu, tapi mudah-mudahan tidak," kata Bupati.

Untuk menekan terjadinya manipulasi laporan data itu, Pemkab Semarang berencana hendak menambah pemasangan *tapping box* di hotel dan restoran.

Hingga saat ini, alat pungutan pajak daring itu sudah ada sebanyak 200 unit.

"Namun tetap perlu diawasi, karena kalau *tapping box* rusak ya laporannya juga susah," tandasnya.

Khusus untuk penempatan pejabat sesuai kompetensi, dia mengatakan, hal itu memang bagus dan disarankan hanya saja sejauh ini masih susah dilakukan.

"Apalagi untuk penempatan pejabat eselon II perlu izin Komisi ASN, bahkan seperti Dikendukcapil harus dapat izin dari Kemendagri. Jadi kami tidak bisa seenaknya," jelasnya.(H86-22)